



Tata Kelola Akuntansi Masa Pemerintahan Raja Airlangga (Accounting Governance Period of King Airlangga)

Novrida Qudsi Lutfillah

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
Jalan Sukarno Hatta No.9 Malang
email: novrida@polinema.ac.id

Doi: <https://doi.org/10.35606/jabm.v29i2.1104>

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 29

No. 02

Halaman 71-78

Bulan Oktober, Tahun 2022

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Abstract

This study aims to determine the form of accounting governance during the reign of King Airlangga in 1019-1043. Historiography is used in this study by accumulating all data, such as scripts from inscriptions, as a series of historical presentations of King Airlangga's reign. The results of the study show that accounting governance is manifested as a form of king Airlangga's charismatic power in regulating the leadership system by recording the inscription. Divine values are used as the basis for governance to achieve the welfare of the people. This can be seen from the determination of sima, the construction of agricultural facilities and the expansion of international trade.

Keywords: Charismatic; Governance; Transparency; Historical Accounting;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tata kelola akuntansi masa pemerintahan Raja Airlangga tahun 1019-1043. Historiografi digunakan dalam penelitian ini dengan mengakumulasi seluruh data seperti skrip yang berasal dari prasasti, menjadi rangkaian pemaparan sejarah pemerintahan Raja Airlangga. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola akuntansi terwujud sebagai bentuk kekuasaan raja Airlangga yang penuh kharismatik dalam mengatur sistem kepemimpinan dengan melakukan pencatatan pada prasasti. Nilai ketuhanan dipakai sebagai dasar dalam tata kelola untuk mencapai kesejahteraan umat. Hal ini terlihat dari penetapan sima¹, pembangunan sarana pertanian dan perluasan perdagangan internasional.

Kata Kunci: Akuntansi Sejarah; Kharismatik; Tata Kelola; Transparansi

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

5 Agustus 2022

Tanggal Revisi:

10 September 2022

Tanggal Diterima:

28 Oktober 2022

¹ Wilayah yang dimerdekakan karena pemberian anugerah oleh raja

PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan suatu sistem yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mengarahkan (*directing*), mengendalikan (*controlling*) serta mengawasi (*supervising*) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama (Huda & Sawarjuwono, 2013; Rahim & Sahrullah, 2017). Tata kelola terlihat pada praktik prinsip transparansi yang diberlakukan pada pemerintah daerah yang diiringi dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan. Namun peraturan-peraturan yang diterbitkan tersebut ternyata tidak serta merta diikuti dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri (Seknas Fitra, 2013; dan Martani dkk, 2014). Fenomena rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik daerah.

Praktik tata kelola dengan prinsip akuntabilitas pada organisasi non profit hingga saat ini masih di dominasi oleh rasionalisasi hubungan *principal-agent* (Fama dan Jensen 1983). Hubungan *principal-agent* timbul karena adanya pemisahan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelolaan modal (*agent*). Pemisahan ini memicu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Prinsip ini ternyata berkebalikan dengan akuntabilitas masjid dimana kemakmuran masjid merupakan suatu cerminan akuntabilitas masjid yang terwujud melalui hubungan dua arah antara masyarakat dan masjid yang dilandasi dengan nilai kejujuran, walaupun disisi lain tersematkan kritik terhadap internal kontrol dan pengawasan keuangan masjid masih sangat lemah (Siskawati, Ferdawati, Siska, 2016).

Manfaat Tata kelola memiliki kemampuan dalam mengubah nilai organisasi, sebagaimana Ryandono dan Wijayanti (2019) menawarkan transformasi tata kelola pada lembaga zakat, yang berdampak pada efektivitas dalam mengembangkan kemandirian sosial ekonomi mustahik. Manfaat selanjutnya, tata kelola yang memiliki value kebaikan mampu menjadikan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran zakat, dengan cara mengatur biaya administrasi dan mengupayakan pendistribusian dana zakat sesuai prioritas pada sektor produktif (Susilowati dan Setyorini, 2018). Manfaat selanjutnya tata kelola pengelolaan keuangan desa dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat membiayai program desa tanpa tergantung dari dana transfer, hal ini menunjukkan tata kelola desa yang baik menciptakan kemandirian desa (Imawan & Mas'adah, 2021). Bentuk tata kelola pada usaha bisnis tua dalam praktiknya memiliki keunikan tersendiri, hal ini terlihat ketika pemilik mendapatkan modal usaha berupa pinjaman, lebih mengedepankan ikatan kekeluargaan dan saling percaya (Nurhalimah dkk, 2019).

Meruntut hasil penelitian mengenai praktik tata kelola akuntansi di organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba, membawa peneliti untuk mencari tahu praktik tata kelola akuntansi di masa pemerintahan Raja Airlangga. Alasan penelitian memilih mengenai sejarah kerajaan di Indonesia, karena penelitian sejenis belum terlalu banyak. Sebut saja penelitian masa Bali Kuno yang dilakukan Budiasih (2014) menginterpretasikan tata kelola perpajakan telah dilakukan di abad IX-XV Masehi. Bentuk tata kelola di masa Bali Kuno terlihat melalui adanya pejabat pemungut pajak disebut Sang mangnalila drbya haji, aturan yang berlaku, dan pencatatan pajak hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara kerajaan kepada Raja. Penelitian lain di masa Kerajaan Mataram Kuno. Tata kelola perpajakan dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi kerajaan dari tingkat terkecil hingga tingkat terbesar. Pajak dikenakan dari penduduk di desa-desa oleh pejabat di tingkat watak (kumpulan desa-desa) oleh pejabat pemungut pajak yang disebut *pratyaya* (Lutfillah & Sukoharsono, 2013). Untuk melengkapi khsanah sejarah akuntansi Indonesia, peneliti memilih Raja Airlangga untuk mengungkap lebih dalam mengenai model tata kelola kerajaan. Raja

Airlangga merupakan sosok agen penting dalam struktur budaya Jawa yang membawa kerajaan mengalami perubahan dan pembaharuan dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, agama, dan sosial, serta nilai yang masih dipakai oleh raja penerusnya dan juga oleh bangsa Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai pemerintahan Raja Airlangga yang berkuasa tahun 1019 – 1043 di Jawa tidak dapat dilepaskan dari penelitian sejarah. Penelitian dan penulisan sejarah sangat mengandalkan peninggalan sejarah sebagai fakta keberadaan peristiwa tersebut. Fakta sejarah merupakan dasar dalam menginterpretasikan kejadian di masa lalu. Fakta tersebut dapat berbicara ketika peneliti sejarah memanggilmnya karena sejarawan yang memutuskan fakta apa yang sesuai dengan lingkup kajian yang diteliti (Carr, 1987:9-11). Untuk mendapatkan fakta sejarah, penelitian sejarah memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk mengungkap kejadian masa lalu, seperti arkeologi, epigrafi, numistik, dan kronologi, namun peneliti sejarah tidak harus memiliki keahlian khusus untuk dapat menjadi ahli dalam menetapkan kemunculan dan usia dari sebuah benda sejarah, mengurai isi prasasti dan membuat kalkulasi astronomi untuk mengetahui waktu kejadian di masa lampau. Peneliti sejarah dapat menggunakan artefak yang telah dikaji para arkeolog seperti prasasti, dokumen tertulis pada lempengan logam, kitab, dan suluk sebagai data dalam penelitiannya.

Untuk Mengungkap praktik tata kelola akuntansi masa pemerintahan Raja Airlangga, maka Fakta sejarah perlu diberikan sentuhan kekuatan yang bergerak di dalam masyarakat, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik. Selanjutnya, Agar dapat mengungkap fenomena sejarah mendekati realitas, peneliti perlu menggunakan pendekatan sejarah multidimensional, yaitu memadukan konsep teori ilmu sosial dan pendekatan struktural. Darban (1991) menjelaskan suatu masyarakat pendukung sejarah akan memiliki berbagai struktur yang ada di setiap aspek kehidupan, yang tercermin dari tindakan yang mengikuti kebiasaan dan adat yang berlaku. Pola tersebut menimbulkan suatu kelembagaan seperti adat istiadat dan etika. Dengan demikian, kelakuan manusia dalam masyarakat distrukturisasikan sesuai dengan tradisi. Pendekatan struktural mempunyai implikasi metodologi yang kompleks dalam penelitian ini karena untuk mengetahui dan memahami struktur bacaan dokumen diperlukan alat analisis dari konsep dan teori. Kehadiran ilmu akuntansi sangat diperlukan terutama untuk mengetahui model tata kelola Raja Airlangga yang sering memberi anugerah dan hak istimewa kepada rakyatnya berupa Sima, membangun bendungan, memperbaiki tanah pertanian dan melaksanakan hubungan perdagangan antara kerajaan dengan bangsa asing.

Adapun tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan heuristik, analisis, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik peneliti menghimpun sumber data sejarah Raja Airlangga dari sumber tertulis dan artefak. Sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum dan sesudah Raja Airlangga dapat memberikan keterangan mengenai masa pemerintahan Raja Airlangga. Untuk menilai sumber tersebut diperlukan suatu analisis guna mengadakan penulisan sejarah. Tahap ini mengidentifikasi sumber yang didapat dengan memberikan pertanyaan dasar mengenai: apakah sumber tersebut relevan dan apakah sumber tersebut asli atau telah diubah. Tahap interpretasi dilakukan setelah mengadakan analisis terhadap sumber sejarah. Ditahap ini akan terhimpun banyak sekali data mengenai raja Airlangga. Data tersebut harus dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis yang tersusun menjadi suatu kisah sejarah. Tahap berikutnya adalah Historiografi yang merupakan tahapan klimaks dari penulisan sejarah yang mengakumulasi seluruh data menjadi rangkaian pemaparan sejarah pemerintahan Raja Airlangga yang berkaitan dengan tata kelola akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosok Raja Airlangga sebagai Penguasa

Raja Airlangga merupakan keturunan raja Pu Sindok, pendiri Dinasti Isana yang memerintah Kerajaan Mataram Kuno di Jawa tahun 929-948 M. Raja Airlangga selama memerintah telah banyak melakukan pembaharuan dari segala aspek kehidupan bernegara dan pembaruan tersebut melatarbelakangi lahirnya kebijakan pada masa pemerintahan Raja Airlangga (Susanti, 2010). Sebagai seorang raja maka tidak terlepas dari kekuasaan. Diperlukan pemahaman mengenai diri Raja Airlangga terlebih untuk mengetahui tata kelola akuntansi Kerajaan Kahuripan². Masyarakat Jawa Kuno memiliki anggapan tersendiri mengenai konsep kekuasaan yang berbeda dengan konsep kekuasaan barat. Perbedaan cara pandang ini tentunya akan memberikan pemahaman yang berbeda pula terhadap kekuasaan. Agar dapat memahami bentuk kuasa sesuai dengan keadaan nyata masa kepemimpinan Raja Airlangga, diperlukan pemahaman dengan kacamata Jawa.

Konsep pokok kekuasaan dalam pandangan hidup tradisional Jawa berkaitan dengan hubungan langsung antara keadaan batin seseorang dan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungannya (Soedjatmoko, 1995). Konsep ini mengartikan bahwa kekuasaan konkret, sebagai suatu daya yang tidak kasat mata, penuh misteri dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan bisa berasal dari diri sendiri, dapat juga menyerap kekuasaan dari luar. Seorang pemimpin yang berkuasa akan menjaga dan menambah kekuasaan dalam dirinya, yang dilakukan dengan cara bertapa, meditasi, yoga, dan memuja Tuhan semata. Konsep ini terlihat pada diri Raja Airlangga sebagaimana tergambar dalam Prasasti Cane:

...Sri Maharaj patapagyenpapenya rin sajjana dharma Makaton jiwitanyan pamrihaken paduka Sri Maharajarin samara karya jati san ksatria mahapurusa (baris 27)

Artinya; ...Sri Maharaj pada waktu memusatkan kekuatannya untuk melakukan tapa sebagai orang bijak bertabiat baik baik yang dihormati sepenuh hati semasa hidup mencurahkan diri untuk menjalani kewajiban sebagai paduka Sri Maharaja sesuai dengan derajat kelahirannya sebagai ksatria mahapurusa.

Kharisma dan legitimasi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam paham kekuasaan Jawa. kharisma dipahami sebagai kualitas luar biasa dari suatu pribadi yang dikaruniai kelebihan yang bersifat supernatural, sedangkan legitimasi digambarkan sebagai kekuatan yang menopang seseorang yang merujuk pada nilai dan kualitas, terlihat dengan adanya hukum dan perintah, tradisi, keadilan, dan identitas etnik. Isi prasasti menyiratkan beberapa cara melegitimasi kedudukan seorang raja. Raja biasanya menuliskan silsilah dirinya dan mencari hubungan genealogi dengan raja-raja yang memerintah sebelumnya atau mempersamakan kekuasaan dan kehebatan seorang raja dengan dewa yang dipujanya sebagaimana Raja Airlangga dalam Prasasti Pucangan tahun 1037:

Kunan saksatiran Wisnumurti rinaksanin sarbwadewata innah aken ta ilwa kasawa deni panusawa ning mahapralaya (sisi A baris 8)

Artinya: tetapi karena ia seperti (penjelmaan) Dewa Wisnu, maka tidak bisa dibinasakan oleh kekuatan mahapralaya.

Berdasarkan skrip Prasasti Cane, disebutkan ksatria Mahapurusa, merupakan nama peruntukkan yang tabiatnya sama dengan Wisnu. Dalam skrip Prasasti Pucangan Raja Airlangga diidentifikasi dengan Wisnu sebagai bentuk legitimasi. Jika dihubungkan

² Masih banyak perdebatan berkaitan nama kerajaan tempat dimana Raja Airlangga berkuasa (Susanti, 2010)

dengan institusi kerajaan maka Raja Airlangga sebagai pemelihara dan pelindung yang tugas utamanya adalah memelihara dunia dan tanah tempat berdiam dan mempertahankan dharma serta menghukum siapa saja yang berbuat jahat (Susanti, 2010).



Sumber: <http://dennycaturprabowo.blogspot.com>

Gambar 1 Garudamukha Lāñhana

Sosok Raja Airlangga juga tergambar dari lambang kerajaan masa pemerintahan Raja Airlangga yang menggunakan Garudhamukha (Gambar 1). Lambang Garudhamuka yang lazim dicantumkan dalam prasasti merupakan simbol yang melambangkan kendaraan Wisnu berupa burung Garuda. Garuda mempunyai arti simbolis berkaitan dengan sifat ketangkasan dan kedahsyatan yang dihubungkan dengan prinsip spiritual.

Dari pemahaman mengenai Raja Airlangga yang dikaitkan dengan kekuasaan, kharismatik, legitimasi, dan lambang Garudhamuka, dapat memberikan gambaran awal mengenai cita-cita yang didukung dengan semangat tinggi untuk meyatukan kerajaan yang terpecah belah dan kerajaan kecil disekelilingnya yang kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. Semangat Raja Airlangga dalam konsolidasi disebutkan Prasasti Turunhyang A yang menguraikan Raja Airlangga sebagai cakravartin atau bertindak layaknya payung dunia (tulusa chatra ning bhuwana), merupakan sifat seorang penguasa bumi yang diyakini dapat memimpin kelangsungan kehidupan alam semesta.

Konsep ini membawa Raja Airlangga berada pada posisi puncak memimpin Mandala³ dan berkewajiban menjaga hubungan politik dan diplomasi (Gonda, 1969) yang mempunyai implikasi terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan hubungan luar negeri (Moerton, 1985). Tekanan diplomasi yang dilakukan secara halus merupakan cara yang dilakukan Raja Airlangga untuk dapat menguasai Mandala sebagai tanda tunduknya kerajaan tetangga secara sukarela pada kekuasaan tertinggi. Prasasti Hyang Tapak menceritakan antisipasi ancaman dari pemusatan kekuasaan Raja Airlangga dengan menyerapkan pusat kekuasaan kerajaan kecil kedalam pusat kekuasaan besar (Anderson, 1986). Bentuk ideal kekuasaan Raja Airlangga berdasarkan konsep mandala dan diri Raja Airlangga sebagai payung dunia yaitu seluruh satuan politik bergabung dalam satu kesatuan terpadu.

³ Dapat digambarkan sebagai hubungan geopolitik yang berkenaan dengan tapal batas dan hubungan dengan negara asing



Gambar 2 Arca perwujudan Airlangga sebagai Dewa Wisnu mengendarai Garuda
(Sumber: Wikipedia)

Praktik Tata Kelola Akuntansi Pemerintahan Raja Airlangga

Airlangga adalah raja pertama yang mempunyai kesadaran tinggi untuk mencatat kejadian penting dalam hidupnya. Teridentifikasi 33 prasasti yang dikeluarkan zaman Raja Airlangga yang masih tersimpan saat ini (Susanti, 2010). Pencatatan tersebut terkait dengan peperangan yang dilakukan Raja Airlangga untuk memperkuat hegemoninya dan ketika raja memberikan anugerah hadiah sima kepada sebuah desa yang mana tertulis penyebutan satu persatu nama kepala keluarga yang mendapatkan sima.

Penerapan status sima pada suatu daerah mempunyai pengertian bahwa penerapan peraturan baru yang terkait dengan masalah perpajakan dan sumber daya kerajaan. Peraturan tersebut berisi ketentuan pajak untuk jenis barang dagangan dan penghasilan yang didapatkan, adanya pejabat tinggi kerajaan yang mengurus perbendaharaan kerajaan. Dengan ditetapkannya suatu daerah menjadi sima bisa dikatakan berkurangnya jumlah pendapatan kas kerajaan karena telah ditetapkan mekanisme baru pembayaran pajak. Seperti dalam prasasti Linggasutan, bila daerah yang telah ditetapkan sebagai sima, maka sepertiga bagian pajak yang didapatkan daerah tersebut yang paling utama dipersembahkan untuk Tuhan yang dilakukan dengan melakukan persembahan dan penjagaan tempat suci, sepertiga kedua untuk pengelolaan daerah sima, dan sisanya diserahkan ke kas kerajaan. Sehingga dapat dikatakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai sima oleh Raja, maka warganya akan mendapatkan segala anugerah kebaikan. Bukti penetapan sima oleh Raja Airlangga terlihat pada Prasasti Cane (1021), Prasasti Kakurungan (1022), dan Prasasti pucangan (1037), dimana raja memberikan anugerah sima karena telah berjasa menjadi benteng kerajaan dan atas baktinya kepada raja.

Perubahan status menjadi sima merupakan cara pengendalian wilayah yang dilakukan Raja Airlangga untuk menjaga wilayahnya tidak tercerai berai, karena penetapan wilayah menjadi sima harus menjalankan serangkaian upacara suci berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan, agar yang diamanahi daerah sima menjaga daerahnya sampai turun temurun dan mengikuti kebijakan yang diberlakukan di daerah tersebut. Semua ketentuan tersebut tertulis dalam prasasti berisi perintah raja. Prasasti berisi segala informasi mulai dari penanggalan suatu kejadian yang diungkap secara rinci menggunakan 12 unsur penanggalan mulai dari tahun, bulan, hari hingga weton. Pemerintahan Raja Airlangga juga menyebutkan secara rinci pejabat desa dan nama seluruh penduduk desa untuk daerah yang mendapatkan anugerah sima. Bagian yang paling penting yaitu Sambadha (isi perintah)

biasanya dijelaskan dengan rinci alasan suatu daerah diberikan status sima. Pencatatan segala kejadian dalam prasasti masa pemerintahan Raja Airlangga merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wilayah (Lutfillah, 2014).

Raja Airlangga berusaha memajukan kemakmuran rakyatnya dengan melakukan perbaikan pengairan, perbaikan transportasi darat dan laut, mengembangkan perdagangan, dan yang terpenting memajukan kehidupan rohani (Susanti, 2010). Dalam Prasasti Kamalagyan (1037) memuat tentang pembuatan bendungan di Wringin Sapta. Titah Raja Airlangga dalam prasasti salah satunya menetapkan pengurangan beberapa macam pajak yang harus diserahkan kepada raja untuk dipergunakan sebagai biaya pemeliharaan bendungan yang memiliki arti penting bagi rakyat terutama untuk mencegah banjir dari sungai Brantas dan terutama untuk mengairi sawah untuk memajukan hasil pertanian.

Penaklukan yang dilakukan oleh Raja Airlangga mempunyai tujuan untuk mengamankan jalur perdagangan agar dapat mengembangkan perdagangan internasional melalui laut. Hal ini dengan memanfaatkan daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo sebagai daerah transit dari pedalaman ke pelabuhan regional dan internasional di Hujung Galuh dan Kambang putih. Indikasi yang menunjukkan perkembangan internasional masa pemerintahan Raja Airlangga terlihat dengan adanya pengenaan pajak bagi orang asing yang menetap atau disebut warga kilalan, yaitu perwakilan dari bangsa asing yang mencari nafkah dan menghasilkan uang dari pekerjaan mereka yang dilakukan di Jawa. Keberadaan mereka dicatat dengan teliti karena berkaitan dengan besaran pajak yang harus dibayar. Sebagaimana dari bangsa asing tersebut memiliki berbagai macam profesi, mulai dari perwakilan dagang dari negaranya, pedagang, kaum profesional dan pekerja seni sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Cane.

Selain mencatat pelaku ekonomi, bagian Prasasti Cane memuat pejabat desa diantaranya petugas pertanian atau huluwair, pakalangkag (penjaga lumbung padi), huluwwatan (pengawas jembatan), huluwras (pengatur hasil beras), kalang (pengatur hutan) dan wariga (ahli primbon). Penyebutan pejabat desa yang bertanggungjawab atas tugas pemeliharaan sarana memberikan bukti bahwa Raja Airlangga memberikan perhatian terhadap rakyatnya dengan dibangunnya pasar, bendungan, sawah, tegalan, pelabuhan, jalan raya, dan sarana penyebrangan air. Penguatan infrastruktur didukung juga dengan kebijakan tertulis dalam prasasti dimana raja memerintahkan untuk memelihara dengan baik demi keamanan pelabuhan Hujung Galuh dan memperbaiki bendungan Waringin Sapta. Kebijakan tersebut bertujuan agar para pedagang merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

KESIMPULAN

Konsep principal-agent yang selama ini berkembang pada organisasi modern tidak berlaku di masa Raja Airlangga, karena konsep kepentingan diri (self interest) untuk memperoleh kemakmuran pribadi (self prosperity), yang menjadi sumber munculnya agency problem, tidak sesuai dengan nilai Masyarakat Jawa. Masa pemerintahan Raja Airlangga hubungan yang ada antara raja dan rakyatnya menggambarkan harmoni ide dari kerajaan bersifat ketuhanan dan memberi bentuk sebuah bingkai kehidupan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan penggunaan data, dimana data berupa prasasti peninggalan Raja Airlangga yang berada pada kisaran tahun 1019-1042 tidak terlalu banyak, dan jika ada, masih sedikit yang mentranskrip pembacaan terhadap isi prasasti dikarenakan kondisi prasasti sudah tidak sempurna lagi dimakan zaman.

Kontribusi riset diharapkan para periset dapat mengembangkan penelitian akuntansi di Indonesia, yaitu dengan melihat fungsi dan peran akuntansi yang tidak bisa dilepaskan dengan nilai dimana akuntansi berada. Hal ini akan dapat mengangkat nilai-nilai dari aspek sosial dan budaya lokal yang membentuk tata kelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, BROG. 1986. Gagasan tentang kekuasaan dan kebudayaan Jawa, dalam Budiarto: Aneka pemikiran tentang kuasa dan wibawa. Jakarta.
- Budiasih, IGAN. 2014. Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 409-420.
- Carr, EH. 1987. *Whay is history*. Penguin books
- Darban, AA. 1991. *Sebuah pendekatan sejarah struktural dan relevansinya untuk sejarah Nasional. Seminar sejarah nasional IV*. Departemen pendidikan dan kebudayaan: Jakarta.
- Fama, E. F., dan M.C. Jensen. 1983. Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26 (2):301.
- Gonda. J. 1969. *Ancient Indian Kingship from the religious point of view*. E.J. Brill: Leiden.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi action research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376-388. <https://doi.org/10.18202/ja-mal.2013.12.7204>
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (3), 689-710. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>
- Lutfillah, NQ. 2014. Akuntansi penetapan sima pada masa Jawa Kuno. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(2): 262- 272.
- Martani, D. Fitriyani, D. & Annisa. 2014. Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. 60, 504-518^[1]_{SEP}
- Moertono, S. 1985. *Negara dan usaha bina negara di Jawa masa lampau*. Yayasan obor Indonesia: Jakarta.
- Nurhalimah., Setiawan, AR., dan Haryadi, B. 2019. Praktik Akuntansi Manajemen Bisnis Besi Tua Berbasis Budaya Persaudaraan Madura. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10 (1), 1-21. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10001>
- Rahim, S., & Sahrullah. 2017. Model pengelolaan zakat perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 200-215. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049>
- Ryandono, MFH., & Wijayanti, I. 2019. Transformasi tata kelola lembaga zakat pada pemberdayaan *social entrepreneur*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1): 153-155.
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). 2013. Indeks keterbukaan badan publik menyediakan informasi anggaran secara berkala: mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis website.sekretariat@seknasfitra.org/www.seknasfitra.org.
- Siskawati, E., Ferdawati, dan Surya, F. 2016. Pemaknaan akuntabilitas masjid: bagaimana masjid dan masyarakat saling memakmurkan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1):70-80. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>.
- Soedjatmoko. 1995. *Historiografi Indonesia: sebuah pengantar*. Gramedia Pustaka utama: Jakarta.
- Susanti, N. 2010. *Airlangga biografi raja pembaru Jawa abad XI*. Komunitas Bambu: Jakarta
- Susilowati, D., & Setyorini, CT. 2018. Efektivitas tata kelola dana zakat, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2): 346-364. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>